

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. PENGANTAR

1. Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 1958 pada tanggal 25 Juli 1958 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau yang sebelumnya tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Terhitung sejak terbentuknya Provinsi Jambi, telah banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Dimulai dengan pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I) periode 1969 -1993. Selama kurun waktu tersebut telah banyak keberhasilan yang dicapai yang merupakan fondasi dalam pembangunan Provinsi Jambi untuk tahap berikutnya terutama dalam membebaskan keterisolasian daerah dengan terbangunnya infrastruktur dasar.
2. Pada saat memasuki PJP II yang dimulai pada tahun 1994, pembangunan meningkat lebih tinggi yang ditandai dengan antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Sejak awal periode pembangunan, struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian, meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung menurun sebagai akibat meningkatnya kontribusi sektor lain seperti perdagangan, jasa dan industri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut juga diiringi dengan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan angka inflasi. Selama kurun waktu pembangunan tersebut, inflasi di Provinsi Jambi dapat terus dipertahankan tidak lebih dari 10 persen. Namun dalam waktu bersamaan proses pembangunan sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses, terutama kualitas institusi yang mendukung untuk melaksanakan pembangunan tidak dikembangkan, bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu

menjalankan fungsinya secara profesional. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan daerah itu sendiri.

3. Dalam keadaan yang rentan seperti itu, pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah dan perbankan nasional yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Sebagai akibatnya, pelaksanaan pembangunan daerah yang didasarkan atas perencanaan jangka panjang menjadi terhenti atau ditinjau kembali dan bahkan diubah haluannya. Selama lima tahun terakhir (1998-2003) pembangunan difokuskan pada upaya mengatasi krisis multidimensi yang terjadi yang akhirnya berhasil menormalkan kembali kehidupan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sudah saatnya untuk memikirkan kembali perencanaan pembangunan jangka panjang. Pemikiran ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam merumuskan arah kebijakan daerah ke depan.
4. Berdasarkan UU SPPN perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ditentukan untuk kurun waktu 20 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan jangka panjang daerah diarahkan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang maju, mandiri, adil dan sejahtera sebagai bagian dari tahap pembangunan pada masa mendatang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

I.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Provinsi Jambi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) dan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen di Provinsi Jambi (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Provinsi sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD) Provinsi Jambi adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dalam waktu duapuluh tahun.

1.3 LANDASAN

Landasan idiil RPJP daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2001-2005.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721).

1.4 TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

- | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Kondisi Umum |
| Bab III | : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun
2005 - 2025 |
| Bab IV | : Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2005 – 2025 |
| Bab V | : Penutup |

BAB II

KONDISI UMUM

II.1. KONDISI SAAT INI

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan kehidupan beragama, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun kedepan.

A. Ekonomi

1. Selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap 1 (PJP 1) Tahun 1969-1993, perekonomian Provinsi Jambi dapat tumbuh rata-rata 7 persen per tahun. Pertumbuhan yang tinggi tersebut juga dapat meningkatkan PDRB Perkapita dari Rp. 29.710 pertahun pada tahun 1969 kemudian meningkat menjadi Rp. 729.390 pada tahun 1990 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 1.857.000,- berdasarkan harga konstan.
2. Selang waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan kenaikan yang mengembirakan. Pada tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanya sebesar 2,90% tetapi tahun 2003 telah mencapai laju pertumbuhan sebesar 4,47%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,42% sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 1999-2004 sebesar 4,72%. PDRB

Perkapita atas harga berlaku juga menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari Rp. 3,39 juta tahun 1999 meningkat menjadi Rp.7,422 juta per tahun 2004 atau tumbuh rata-rata 13,95% per tahun. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut juga dibarengi dengan penurunan tingkat inflasi. Pada tahun 2000, tingkat inflasi Provinsi Jambi sebesar 8,4%, tahun 2001 dan 2002 tingkat inflasi masing-masing sebesar 10,11% dan 12,84% tetapi pada tahun 2003 tingkat inflasi dapat diturunkan menjadi 3,7% dan inflasi tahun 2004 sebesar 4,92%.

3. Struktur perekonomian Jambi pada awal Pelita I sangat didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi lebih dari 55 persen. Memasuki tahun 1989, awal Pelita V, peran sektor pertanian mulai menurun hingga 35 persen. Dalam era tahun 1990-an, dominasi sektor pertanian cenderung menurun tinggal 26,27 persen pada tahun 1997. Sebagian besar perannya mulai diambil alih oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan yang meningkat cukup tajam pada periode tersebut. Sejak tahun 1998 sektor pertanian kembali mulai mengalami peningkatan yaitu dari 27,33 persen menjadi 27,65 persen tahun 1999 dan menjadi 28,15 persen tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 28,29 persen tahun 2004. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih merupakan tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, dimana sektor pertanian selama ini mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Berdasarkan sektor utama, kontribusi sektor primer juga meningkat dari 35,75 persen tahun 1999 meningkat menjadi 38,19 persen tahun 2004, sejak krisis ekonomi kontribusi sektor industri sedikit mengalami penurunan dari 20,85 persen tahun 1999 menjadi 19,46 persen tahun 2004, kontribusi sektor utilitas sedikit mengalami kenaikan dari 11,46 persen tahun 1999 meningkat 11,63 persen tahun 2004, sedangkan kontribusi sektor jasa-jasa mengalami penurunan yang relatif kecil dari 31,94 persen tahun 1999 menjadi 30,71 persen tahun 2004. Keadaan ini menggambarkan

pengaruh krisis ekonomi nasional yang belum pulih juga berpengaruh kepada perekonomian daerah Jambi.

4. Peranan industri kecil dalam perekonomian daerah sangat penting kerana mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan perdagangan serta jasa. Perkembangan usaha kecil di Provinsi Jambi selama periode 2000-2004, mengalami kenaikan dari 13.064 unit di tahun 2002 menjadi 14.942 unit pada tahun 2003 atau naik 14,38 persen. Tenaga kerja yang terserap juga meningkat dari 44.257 tenaga kerja menjadi 46.823 tahun 2003 atau meningkat sebesar 5.8 persen. Walaupun demikian pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tersebut tidak terjadi kenaikan yang berarti dari angka tenaga kerja tersebut belum cukup tinggi karena selama periode 2000 sampai 2004 tersebut tidak terjadi kenaikan yang berarti dari angka tenaga kerja per unit usaha, yang relatif konstan atau rata-rata jumlah tenaga kerja per unit usaha adalah 3 orang. Hal ini juga berkaitan dengan kredit yang dialokasikan untuk usaha kecil masih relatif kecil yaitu Rp. 15 Milyar melalui penyediaan dana KUPEM atau sekitar 0,63 % dari total kredit yang disalurkan dunia perbankan di Jambi pada tahun 2003. Disamping itu penyaluran kredit yang dilakukan perbankan kurang dibarengi dengan pendampingan dari instansi yang terkait dan evaluasi yang konstruktif dari dunia perbankan sendiri.
5. Perdagangan luar negeri Provinsi Jambi selama periode 1999 – 2004 mengalami tekanan yang sangat berat. Pertumbuhan ekspor hanya 3.10 persen per tahun jauh lebih lambat dari pertumbuhan impor yaitu 11,34 % per tahun pada periode 1999-2004. Hal ini disebabkan ekspor hasil industri mengalami penurunan sebesar 2,21 persen per tahun dan non industri -1.17 % per tahun, namun sektor migas mengalami

peningkatan yang sangat besar yaitu pertumbuhannya mencapai 47,36 % pertahun pada periode 1999-2004. Penurunan ekspor industri ini disebabkan ekspor Plywood mengalami penurunan -11,88 % per tahun dan ekspor pulp & paper juga mengalami penurunan sebesar -8,57 % per tahun pada periode 1999-2004. Sedangkan penurunan ekspor non industri disebabkan ekspor hasil perkebunan mengalami penurunan sebesar -30,47 % per tahun, namun ekspor hasil hutan ikutan mengalami pertumbuhan sebesar 10,97 persen pertahun pada periode 1999 - 2004. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus mulai melakukan terobosan untuk meningkatkan ekspor nonmigas, karena industri kayu olahan yang selama ini menjadi primadona ekspor daerah Jambi sudah mulai menurun yang disebabkan pasokan bahan baku yang semakin langka.

6. Perkembangan rencana dan realisasi investasi swasta domestik (PMDN) mengalami pertumbuhan, dimana pertumbuhan realisasi lebih tinggi dibanding pertumbuhan rencana. Pertumbuhan rata-rata realisasi mencapai 8,89 % selama periode 1999-2004, sedangkan pertumbuhan rencana hanya 3,02 %. Hal ini menunjukkan Provinsi Jambi cukup prospektif bagi investor swasta nasional. Demikian juga untuk tingkat realisasi mengalami peningkatan dari 22,29 persen tahun 1999 meningkat menjadi 29,42 % tahun 2004. Keadaan ini mengindikasikan kepercayaan investor swasta nasional untuk berinvestasi ke Jambi semakin baik, karena Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang stabilitas keamanannya cukup baik di Indonesia. Rendahnya persentasi realisasi investasi PMDN tahun 1999 di Provinsi Jambi juga terjadi dalam skala regional yang salah satu disebabkan kondisi infrastruktur dan transportasi yang relatif rendah dan kurang mendukung bagi investasi mereka di Jambi sehingga investor banyak menunda atau mengalihkan investasi ke daerah lain yang mempunyai infrastruktur lebih lengkap dan dekat dengan daerah pemasaran seperti Pulau Jawa yang

lebih menguntungkan bagi investor. Namun sejak tahun 2000 Pemerintah daerah Provinsi Jambi telah berupaya meningkatkan infrastruktur lainnya seperti jaringan listrik, air dan telepon. Sebagian besar investasi PMDN bergerak di sektor perkebunan dan hasil kehutanan.

7. Perkembangan rencana dan realisasi investasi swasta asing (PMA) di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan, dimana pertumbuhan realisasi lebih tinggi dibanding pertumbuhan rencana. Pertumbuhan rata-rata realisasi mencapai 51,19 persen, sedangkan pertumbuhan rencana hanya 40,56 persen selama periode 1999-2004. Hal ini menunjukkan Provinsi Jambi cukup menarik bagi investor asing. Demikian juga untuk tingkat realisasi mengalami peningkatan dari 7.99 persen tahun 1999 meningkat menjadi 11.50 persen tahun 2004. Keadaan ini mengindikasikan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi ke Jambi relatif meningkat, karena Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang stabilitas keamanannya cukup baik di Indonesia. Rendahnya persentase realisasi tahun 1999 di Provinsi Jambi juga terjadi dalam skala nasional yang salah satu disebabkan kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan pada saat itu tidak begitu kondusif sehingga investor asing banyak menunda atau mengalihkan investasi ke negara lain yang lebih kondusif. Sebagian besar investasi PMA bergerak di sektor minyak dan gas.
8. Krisis tahun 1997 telah berpengaruh pada perekonomian daerah Jambi karena dalam waktu kurang dari satu tahun nilai tukar rupiah merosot drastis mencapai sekitar Rp. 15.000,- per 1 USD. Implikasinya, industri yang beroperasi di Jambi yang mengandalkan bahan baku ataupun bahan setengah jadi impor nilainya membengkak dalam rupiah, keadaan ini mendorong biaya produksi meningkat sangat tajam dan mengakibatkan permintaan agregate domestik terus menurun sampai dengan pertengahan 1998 sehingga PDRB mengalami kontraksi sekitar 9.6 persen pada tahun tersebut. Banyaknya perusahaan yang bangkrut

mengakibatkan pengangguran meningkat tajam hampir dua kali lipat yaitu 55.000 orang dan jumlah masyarakat miskin meningkat 20 persen dari 562.000 orang tahun 1996 menjadi 677.000 orang pada tahun 1999. Hingga tahun 2004, angka kemiskinan masih relatif tinggi (325.000 jiwa atau 12,5 persen) dan jumlah pengangguran 16.129 orang.

9. Dengan berbagai program penanganan krisis yang diselenggarakan selama periode transisi politik, kondisi mulai membaik sejak tahun 2000. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi pasca krisis telah tumbuh dari - 9,6 persen tahun 1998 menjadi 5,42 persen tahun 2004. Laju inflasi dapat ditekan dibawah 10 persen, pertumbuhan PAD meningkat dari Rp. 34,175 miliar tahun 1999 menjadi 246,236 miliar tahun 2004, aset perbankan juga mengalami peningkatan dari Rp. 2,82 triliun tahun 1999 menjadi 5,28 triliun tahun 2004, dana pihak ketiga diperbankan juga mengalami peningkatan dari 2,27 triliun tahun 1999 menjadi Rp. 4,36 triliun tahun 2004, penyaluran kredit perbankan juga mengalami peningkatan dari Rp. 1,413 triliun tahun 1999 meningkat menjadi Rp. 2,694 triliun tahun 2004. Kemudian terjadi penurunan suku bunga simpanan perbankan secara signifikan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan daerah. Meskipun belum optimal, penurunan suku bunga ini telah dimanfaatkan oleh perbankan daerah untuk melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan penyaluran kredit, terutama untuk usaha kecil dari Rp. 366 miliar tahun 1999 mendjai Rp. 1,092 triliun tahun 2004. Di sektor riil, kondisi yang stabil tersebut memberikan kesempatan dunia usaha untuk melakukan restrukturisasi keuangan secara internal.
10. Pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat relatif baik yang digambarkan oleh Koefisien Gini pada tahun 1999 sebesar 0,24, kemudian menurun menjadi 0,23 tahun 2004. Pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jambi juga menunjukkan keadaan yang relatif baik, yang digambarkan oleh nilai Koefisien

Williamson sebesar 0,32 tahun 1999, sedikit meningkat menjadi 0,37 pada tahun 2004, namun angka indeks Williamson tersebut masih berada di bawah tingkat kesenjangan ringan.

11. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro daerah. Namun demikian, kinerja tersebut belum juga mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkat sebelum krisis. Hal tersebut disebabkan karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi, diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi termasuk praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan aturan-aturan yang terkait dengan peraturan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi daerah dan ekspor juga disebabkan karena lemahnya daya saing daerah terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi di pasar regional dan internasional. Lemahnya daya saing tersebut, di samping dipengaruhi oleh masalah-masalah yang diuraikan di atas, juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh cukup kuat adalah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi. Lambatnya penyelesaian dari semua permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan dan ketahanan perekonomian daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian daerah.
12. Pertumbuhan penduduk Jambi masih relatif tinggi, dan penyebarannya tidak merata pada kabupaten/kota, dan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Karena itu, masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Luasnya wilayah dan rendahnya infrastruktur dasar serta beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di Provinsi Jambi

menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

B. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia, masyarakat dan lingkungan sosial. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah dan komposisi demografi, maupun aspek kualitas sumber daya manusia (SDM).

1. Di bidang kependudukan, upaya pengendalian laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang dilakukan selama ini, dari waktu ke waktu telah mampu menekan tingkat pertumbuhan penduduk dan menyeimbangkan penyebarannya. Namun demikian, jumlah penduduk Provinsi Jambi terus meningkat, baik akibat kelahiran maupun perpindahan penduduk dari luar daerah. Pada tahun 2000 penduduk provinsi Jambi berjumlah 2.407.166 jiwa, pada tahun 2004 meningkat menjadi 2.619.553 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.6 persen dan dengan laju pertumbuhan demikian maka pada tahun 2025 diprediksi meningkat menjadi 3.509.531 jiwa. Begitu pula dilihat dari mobilitas penduduk terdapat kecenderungan peningkatan urbanisasi, sehingga peningkatan jumlah penduduk terkonsentrasi pada wilayah perkotaan.
2. Pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Sebagai hasil pembangunan yang dilakukan selama ini, saat ini kualitas SDM menjadi semakin baik, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 1990, IPM Provinsi

Jambi tercatat 65.4 meningkat menjadi 67.1 pada tahun 2002. Meskipun demikian masih sedikit di bawah IPM nasional sebesar 69.2 pada tahun 2002. IPM Provinsi Jambi menempati rangking 10 dari 33 provinsi secara nasional.

3. Terdapat berbagai indikator yang menunjukkan peningkatan taraf pendidikan penduduk di Provinsi Jambi. Di antaranya adalah *angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah dan partisipasi pendidikan berdasarkan usia sekolah*. Terkait dengan angka melek huruf menunjukkan pada tahun 1990 angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Jambi sebesar 89,49%. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 95,68 persen pada tahun 2003. Dari rata-rata lama bersekolah penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Jambi juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 1990 sebesar 5,16 tahun, menjadi 6,77 tahun pada tahun 2003. Hal yang sama juga terlihat dari tingkat partisipasi pendidikan penduduk. Dari total penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun), yang masih bersekolah pada tahun 1990 sebesar 91,27 persen menjadi 98,35 persen pada tahun 2004. Dari total penduduk usia SMTP (13-15 tahun) yang masih bersekolah pada tahun 1990 sebesar 66,32 persen menjadi 82,61 persen pada tahun 2003. Dari total penduduk usia SMTA (16-18 tahun) yang masih bersekolah pada tahun 1990 sebesar 38,88 persen menjadi 52, 89 persen pada tahun 2003. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan. *Pertama*, program wajib belajar 9 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2003 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMTP belum mencapai/mendekati angka 100%. *Kedua*, tingkat partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SMTA (baru sekitar separuhnya dari usia sekolah SMTA yang melanjutkan pendidikan) menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi. *Ketiga*, masih terdapatnya disparitas tingkat pendidikan

antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender. *Keempat*, masih rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komperatif daerah.

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, antara lain dapat dilihat dari status kesehatan serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya *usia harapan hidup*, *menurunnya angka kematian bayi*, *Angka kematian ibu dan status gizi buruk*. Berdasarkan konsep ini dapat dikemukakan bahwa selama periode 1990-2004, usia harapan hidup di Provinsi Jambi telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 1990 usia harapan hidup Provinsi Jambi sebesar 59,30 menjadi 66,9 pada tahun 2002, dan 69,50 pada tahun 2004. Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 74 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 30,20 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2004. Sedangkan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah menurun dari 219,78 pada tahun 1999 menjadi 214,82 pada tahun 2004. Begitu pula dengan status gizi buruk dari 5,51% pada tahun 1999 menurun menjadi 3,2% pada tahun 2004. Dari sisi pola penyakit yang diderita oleh masyarakat pada umumnya masih berupa infeksi menular. Sepuluh penyakit dengan prevalensi tertinggi adalah Penyakit akut Lain pada saluran Pernapasan bagian Atas (ISPA), Penyakit Kulit Infeksi, Penyakit pada Sistem Otot dan jaringan Pengikat, Penyakit Malaria, Diare (Termasuk Tersangka Kolera), Malaria Klinis, Penyakit Pulpa dan Jaringan Peripikal, Penyakit Tekanan Daerah Tinggi, Kecelakaan dan Rudo Paksa. Kondisi Seperti ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen

kesehatan. Namun demikian disparitas status kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender masih cukup lebar. Selain itu, masalah kesehatan masyarakat menghadapi beban ganda penyakit, yaitu di satu pihak masih banyaknya penyakit infeksi menular yang harus ditangani, di pihak lain mulai meningkatnya penyakit tidak menular.

5. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Hal ini terlihat antara lain dari menurunnya angka penduduk miskin di Provinsi Jambi dari 26,64% pada tahun 1999 menjadi 12,45% pada tahun 2004. Meskipun demikian berbagai masalah kesejahteraan sosial juga masih ditemui, seperti masih tingginya keluarga miskin, korban tindak kekerasan, korban bencana sosial, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan anak nakal, korban eks narkoba, keluarga rentan masalah sosial, dan komunikasi adat terpencil.
6. Dalam kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah jemaah haji dari daerah Jambi dari sejumlah 599 jemaah pada tahun 1999 menjadi menjadi 1956 pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 227%. Begitu juga jika dilihat dari peningkatan jumlah sarana peribadatan, pada tahun 1999 terdapat sejumlah 2.442 masjid, pada tahun 2004 meningkat menjadi 2801 atau 14%. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan masyarakat dan pemuka agama untuk membangun kerukunan beragama dan hubungan intern dan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian peningkatan kesadaran kehidupan beragama tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Moralitas agama mengenai kejujuran, etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun diri,

masyarakat dan daerahnya. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari – hari.

7. Dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari semakin baiknya kualitas hidup perempuan dan anak, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup perempuan di Provinsi Jambi dari 68,6 pada tahun 1999 menjadi 68,8 pada tahun 2002. Di sisi lain angka kematian bayi mengalami penurunan dari 74 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 30,20 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2003. Keberhasilan lain terlihat semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan wanita dan semakin banyaknya jumlah wanita yang memasuki sektor publik, baik pada eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun demikian kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah di banding laki-laki. Dibidang politik misalnya hanya 6 orang (13%) jumlah perempuan dari 45 jumlah anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2004 – 2009. Indikator lain terlihat dari rendahnya indek pembangunan gender (IPG) Provinsi Jambi, yaitu pada tahun 2002 tercatat 53,3 menempati ranking ke 25 nasional. Di sisi lain partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di kalangan masyarakat. Dalam bidang ini prestasi Provinsi Jambi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) selama ini selalu berada pada peringkat yang cukup terhormat, namun demikian prestasi tersebut belum didukung dengan jaminan berkelanjutan.
8. Meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya merupakan pertanda pembangunan budaya sudah mengalami kemajuan. Namun di sisi lain upaya pembangunan jatidiri bangsa seperti : penghargaan terhadap nilai budaya nasional dan budaya daerah, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan

semakin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidak merataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Dengan adanya perubahan paradigma pada akhir dekade ini dimana faktor teknologi memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang di kenal dengan Tekno ekonomi (*Techno-Economy Paradigm*). Perubahan paradigma ini juga berimplikasi terhadap transisi perekonomian yang semula berbasiskan sumberdaya (*Resouce Base Economy*) menjadi perekonomian berbasis pengetahuan (*knowladge Based Economy*). Untuk Indonesia, walaupun terjadi peningkatan iptek yang tercermin dari peningkatan patent dan publikasi ilmiah, namun kemampuan iptek yang ada belum sanggup menghadapi tantangan persaingan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowladge based economy*). Hal ini tercermin masih rendahnya indeks pencapaian teknologi (IPT) yang dilaporkan UNDP tahun 2001 yakni menempati urutan 60 dari 72 negara.
2. Untuk provinsi Jambi sejak dua dekade terakhir telah terlihat kecenderungan terjadinya peningkatan perkembangan IPTEK yang tercermin dari kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek yang dihasilkan. Hal ini tercermin dari telah mulai dimanfaatkannya teknologi oleh masyarakat terutama pada tanaman pangan berbagai hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi. Implikasi terjadinya pemanfaatan teknologi ini terlihat terjadinya peningkatan produktivitas komoditi tanaman pangan seperti hasil tanaman padi dari produktivitas 29,82 kw/ha pada tahun 1990. Sampai kurun waktu terakhir ini produktivitasnya tersebut terus meningkat dari 34,01 kw/ha tahun 1999 dan terus meningkat menjadi

39,18 kw/ha tahun 2004 dengan pertumbuhan 2,871 % per tahun. Demikian juga terhadap palawija seperti jagung pada tahun 1990 produktivitasnya baru hanya mencapai 14,92 kw/ha. Kemudian produktivitasnya juga terus meningkat dari 16,17 kw/ha tahun 1999 menjadi 30,94 kw/ha tahun 2004 dengan laju pertumbuhan 13,87 % per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada kedelai, dimana produktivitasnya hanya 8,23 kw/ha pada tahun 1990, juga terus meningkat dari 10,38 kw/ha tahun 1999 menjadi 14,00 kw/ha tahun 2004 dengan laju pertumbuhan 6,96 % per tahun. Peningkatan produktivitas ini mengindikasikan terjadinya peningkatan pemanfaatan IPTEK dan aktivitas diseminasi hasil penelitian pada masyarakat pertanian di Provinsi Jambi.

3. Untuk provinsi Jambi walaupun telah terjadi peningkatan pemanfaatan IPTEK namun pencapaian ini dinilai belum memadai untuk meningkatkan daya saing produk terutama produk pertanian di Provinsi Jambi. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh masih belum memadainya sumbangan iptek pada mata rantai agribisnis terutama sektor hulu (up-stream dan hilir (down stream) untuk sebahagian komoditi pertanian, seperti perkebunan, peternakan dan perikanan. Di sektor hulu (up-stream) sampai saat ini Provinsi Jambi belum dapat memenuhi kebutuhan saprodi, seperti bibit di sektor perkebunan kelapa saawit dan karet yang selama ini pasokannya dipenuhi dari luar Provinsi Jambi. Karena sangat tingginya permintaan terhadap bibit, kondisi ini memberi peluang yang sangat besar beredarnya bibit seperti bibit sawit asalan (bukan unggul) yang sangat merugikan petani. Hal serupa juga terjadi pada penyediaan bibit ternak dan perikanan, terutama bibit ternak sebagian besar kebutuhan bibitnya belum dapat dipenuhi oleh Provinsi Jambi dan harus didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini menjadikan pertumbuhan peningkatan populasi terutama ternak ruminasia seperti sapi, kerbau sejak tahun 1999 sampai tahun 2004 cenderung menurun dengan laju

pertumbuhan -1,39 % dan -1,77% pertahun. Keadaan ini menjadikan provinsi Jambi tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan protein hewannya sehingga harus didatang dari luar Provinsi Jambi. Pada tahun 2003 data menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan daging Provinsi Jambi, ketergantungan kita pada pihak luar untuk sapi potong mencapai 10.769 ekor (61,20%), sedangkan kerbau 5.965 ekor (54,48%) dan kambing 4.894 ekor (23,32%) yang harus didatangkan dari provinsi lain seperti Provinsi Lampung dan daerah lainnya. Disamping itu belum efektifnya mekanisme intermediasi IPTEK juga menjadi salah satu masalah yang perlu diantisipasi bagi Provinsi Jambi. Sementara itu pada sektor perkebunan di bagian *on farm* (budidaya) walaupun terjadi peningkatan yang signifikan sampai tahun 2004, seperti karet sekarang sudah mencapai luas tanam 565.000 Ha dengan produksi 241.704 ton, kebun sawit 340.000 Ha dengan produksi CPO 664.164 ton, kelapa 128.000 Ha dengan produksi 119.243 ton, Casiavera 59.000 Ha dengan produksi 31.353 ton, Kopi 28.400 Ha dengan produksi 5.217 ton namun pada sektor hilir (*down stream*) untuk semua komoditi tersebut belum banyak tersentuhnya oleh pemanfaatan IPTEK sehingga yang dihasilkan baru berupa produk primer seperti sawit baru hanya tingkat *crude palm oil* (CPO). Untuk kedepan sangat perlu semua produk primer ini diberi muatan *processing* yang bermuatan IPTEK sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global serta juga dapat meningkatkan mata rantai nilai tambah (*value chain*) dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani.

4. Peran penyuluh yang sangat signifikan dan menjadi ujung tombak untuk intermediasi IPTEK ke masyarakat selama ini sudah kurang terdengar lagi. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya sinergi kebijakan yang ditempuh dengan menyerahkan pembinaan penyuluh ke daerah atau kabupaten. Pola dan sistem kerja penyuluh yang sudah mapan selama ini menjadi tidak efektif lagi. Kondisi ini menyebabkan kurang berkembangnya budaya iptek juga menjadi penyebab belum berkembangnya IPTEK di

Provinsi Jambi. Hal ini tidak terlepas dari masih sangat rendah kontribusi institusi penghasil IPTEK, seperti Balai Pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian (BPPTP), Balai Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) dan Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi. Keadaan ini tidak terlepas dari sangat minimnya SDM, Sarana dan Prasarana serta pembiayaan untuk kemajuan IPTEK di Provinsi Jambi.

5. Percepatan perkembangan IPTEK yang sangat pesat dalam akhir dua dekade ini telah membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Dalam kaitannya dengan globalisasi telah terjadi revolusi teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan dalam bidang pemerintahan. Akan tetapi sampai saat ini di Provinsi Jambi penggunaan Teknologi Informasi untuk keperluan pelayanan publik belum menjadi bagian sistem yang utuh untuk optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya SDM yang menguasai TI disamping infrastruktur yang tidak memadai dalam pemanfaatan TI sehingga proses pelayanan publik masih banyak dilakukan secara manual. Pelayanan manual ini juga berdampak dengan terjadinya kontak secara langsung antara konsumen dan para pelayan publik yang cenderung menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam setiap rantai pelayanan dalam birokrasi. Untuk ke depan untuk optimalisasi pelayanan publik dan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi TI, maka pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih transparan dan dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang, lebih baik, dan lebih murah perlu untuk segera dibangun dan dilaksanakan.
6. Disamping pemanfaatan IPTEK berbasis Teknologi Informasi untuk pelayanan publik, untuk meningkatkan kualitas SDM Provinsi Jambi juga perlu dibudidayakan penggunaan Teknologi Informasi dalam bentuk Cyber-net (internet) terutama untuk pelajar di semua jenjang pendidikan. Pengenalan Cyber-net atau internet sejak dini terutama bagi

pelajar, akan memudahkan mereka untuk mengakses informasi untuk keperluan dalam penyelesaian pendidikan mereka. Namun sampai saat ini, penggunaan cyber-net dikalangan pelajar di semua jenjang pendidikan di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan masih sangat terbatasnya fasilitas cyber-net di sekolah-sekolah. Untuk ke depan pemberian akses dengan biaya yang terjangkau di pusat-pusat pendidikan dan sekolah sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas SDM di Provinsi Jambi.

7. Kemajuan IPTEK dalam dunia kesehatan juga sangat pesat perkembangannya akhir-akhir ini. Namun bagi masyarakat provinsi Jambi akses untuk memperoleh manfaat dari kemajuan Iptek di bidang kesehatan ini sangat jauh dari ideal. Hal ini disebabkan belum memadainya fasilitas kesehatan dengan peralatan canggih yang tersedia di Provinsi Jambi disamping pelayanan rumah sakit yang sangat jauh dari sikap *hospitality* (keramahan). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Jambi yang berkemampuan terpaksa berobat ke pusat Ibukota atau ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ke depan penyediaan rumah sakit yang representatif dan mengikuti perkembangan teknologi kesehatan sudah mutlak harus di hadirkan di Provinsi Jambi dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Sarana dan Prasarana

1. Perkembangan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi yang merupakan pijakan dasar dalam perencanaan pembangunan dalam tiga dekade terakhir ini pertumbuhannya cukup signifikan, dimana selama periode 1971 – 1980 mencapai 4,07%. Kemudian sedikit turun selama periode 1980-1990 menjadi sebesar 3,4% dan untuk periode 1990-2000 turun lagi mendjai 1,84%. Untuk ke depan, pertumbuhan penduduk rata-rata diperkirakan tetap seperti periode sebelumnya selama periode 2000-2010 kemudian turun pada periode 2010-2020 menjadi 1,44% dan

akhirnya pada 2020-2025 tingkat pertumbuhannya menjadi 1,04%. Dengan pola pertumbuhan penduduk seperti di atas diperkirakan jumlah penduduk mencapai 3.509.531 jiwa pada tahun 2025, kebutuhan perumahan selama 20 tahun mendatang diperkirakan akan semakin meningkat pula. Peningkatan jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan peningkatan kebutuhan perumahan. Pada tahun 1999 kebutuhan rumah untuk Provinsi Jambi mencapai 550.260 unit, namun pada tahun 2004 terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu sudah mencapai 813.335 unit dengan laju pertumbuhan 8,13% per tahun. Dari total kebutuhan untuk tahun 2004 tersebut yang dapat dipenuhi baru mencapai 732.477 unit yang pemenuhannya oleh perumnas 3.950 unit (0,54%), perorangan 696.858 unit (95,14%) dari yang dapat dipenuhi. Permasalahan dalam hal ini adalah peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan rumah bagi masyarakat masih sangat terbatas dan sampai saat ini umumnya kebutuhan rumah sebagian besar penyediaan kebutuhan masih diusahakan sendiri (perorangan) yang mencapai 85,68% dari total kebutuhan perumahan.

2. Sampai saat ini kemampuan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak dan murah bagi penduduk Jambi yang berpendapatan rendah masih sangat terbatas. Terbatasnya kemampuan pemerintah ini menjadi pemicu menurunnya kualitas kawasan perumahan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman ini khususnya di daerah perkotaan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi ke depan. Hal ini disebabkan karena cakupan penanganan persampahan di kawasan perkotaan di Provinsi Jambi masih sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah sampah dan akan berpengaruh pada kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat.

3. Air merupakan kebutuhan dasar yang mutlak bagi kelangsungan kehidupan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian. Sampai saat ini di Provinsi Jambi penyediaan air minum perpipaan untuk kebutuhan sehari-hari tidak mengalami kemajuan yang berarti. Sampai tahun 2004 tingkat pelayanan air bersih masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jambi yang mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baru mencapai 35% persen. Masih rendahnya pelayanan air minum ini sangat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap air bersih yang berkualitas sehingga berdampak pada derajat kesehatan masyarakat Jambi. Di bidang pertanian tingkat pemanfaatan juga irigasi masih rendah dan sampai tahun 2004 baru hanya mencapai 53,28%. Hal ini mengindikasikan masih banyak lahan pertanian yang bersifat tadah hujan di Provinsi Jambi. Kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian yang sebagian besar merupakan sumber mata pencarian masyarakat Jambi.
4. Di bidang kelistrikan, permasalahan pokok yang dihadapi antara lain; masih besarnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik karena kemampuan investasi dan pengelolaan penyediaan tenaga listrik menurun yang berakibat pada terganggunya kesinambungan penyediaan tenaga listrik termasuk listrik perdesaan. Sampai saat ini untuk Provinsi Jambi tingkat elektrifikasi baru mencapai 26% dan termasuk yang paling rendah di Sumatera. Bahkan menurut hasil perhitungan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan energi listrik perorangan penduduk Jambi baru hanya mencapai 10 watt/orang (standar 100 watt/orang), sedangkan di Pulau Jawa telah mencapai 180 watt/orang. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya efektivitas dan efiseinsi yang dalam satu dasawarsa terakhir tingkat *losses* masih cukup besar; masih besarnya ketergantungan pembangkit listrik berbahan bakar minyak; serta masih dominannya peralatan dan material penunjang yang di impor. Sampai saat ini untuk pemenuhan kebutuhan listrik provinsi

Jambi masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebanyak 132 unit dan pembangkit listrik tenaga Gas (PLTG) sebanyak 2 unit. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik yang merata dihadapkan pada belum terbangunnya infrastruktur dasar kelistrikan sampai ke tingkat pedesaan di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini menyulitkan pengembangan system kelistrikan yang optimal. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah potensi energi PLTA di Kabupaten Kerinci yang meskipun cukup besar namun sudah dilirik investor untuk dibangun pembangkit tenaga listrik. Permasalahan mendasar lainnya di bidang kelistrikan adalah keterbatasan SDM, iptek, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang tinggi setiap tahun; serta daya beli masyarakat yang masih rendah.

5. Sejak terjadi Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 sangat berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan yang saat ini kondisinya sangat memperhatikan. Untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2004 dari seluruh panjang jalan yang berada dalam kondisi baik hanya mencapai 43,4%, kondisi sedang 35,6% kondisi rusak 27,4% dan rusak berat mencapai 16,1%. Bahkan pada wilayah tertentu kondisi jalan rusak mencapai 80%. Cukup tingginya prosentase jalan yang rusak dan rusak berat ini tidak terlepas dari akibat pembebanan muatan lebih (*excessive over loading*) terutama yang disebabkan oleh truk dengan tonase tinggi sehingga berakibat hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai. Dengan cukup tingginya prosentase jalan yang rusak dan rusak berat tersebut, maka ke depan Pemerintah Provinsi Jambi harus tetap memprioritaskan perbaikan dan peningkatan prasarana jalan seluruh wilayah Jambi. Disamping itu untuk mendorong pengembangan wilayah, pembangunan prasarana transportasi jalan yang merupakan urat nadi perekonomian ini harus terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat membutuhkan prasarana jalan yang terus meningkat pula. Disamping pembangunan jalan, saat ini juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi darat lainnya berupa jembatan yakni

pembangunan Jembatan Batanghari II yang terletak di Kelurahan Sijenjang, Jambi – Muara Sabak. Jembatan ini akan menghubungkan Kota Jambi dengan wilayah sekitarnya, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi dan memiliki panjang sekitar 2.262 meter dan lebar sekitar 9 meter yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Keberadaan jembatan penghubung ini memiliki manfaat dan keuntungan yang cukup besar, antara lain : (a) Memperpendek jarak tempuh menuju ke Pelabuhan Muara Sabak dan (b) mengurangi lalu lintas kendaraan angkutan barang serta orang di Jalan Lintas Timur.

6. Sampai saat ini peran armada angkutan darat di Provinsi Jambi sudah sangat menurun, bahkan cukup banyak armada angkutan darat tidak melayani route rutinnnya lagi terutama dari angkutan antar provinsi. Keadaan ini terjadi disamping sarana jalan darat yang banyak yang rusak sehingga perjalanan darat tidak menyenangkan lagi dan butuh waktu yang lama juga tidak terlepas dari kalah bersaingnya dengan angkutan udara yang harga tiketnya relative murah. Kondisi ini khususnya pada angkutan udara walaupun dapat menyediakan pelayanan yang terjangkau, namun disisi lain akan mematikan usaha angkutan darat berikut rantai ekonomi yang dilaluinya. Disamping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami kendala sejak pelaksanaan desentralisasi yang berpengaruh pada pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi. Hal ini karena terbatasnya dana pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih.
7. Provinsi Jambi memiliki dua pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Kuala Tungkal di pantai Timur Sumatera yang berada di Muara Sungai Pengabuan, dan Talang Duku di alur Sungai Batanghari yang digunakan untuk ekspor komoditi antara lain : Karet, Kayu Lapis, dan moulding ke Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Korea. Untuk kelancaran bongkar muat serta mengatasi perbedaan permukaan air pada saat musim hujan dan kemarau yang dapat mencapai 8 meter,

maka Pelabuhan Talang Duku ini dilengkapi dengan dermaga apung. Saat ini sedang dikembangkan Pelabuhan Muara Sabak yang sangat layak dijadikan Pelabuhan Samudera yang dapat memberi kemudahan bagi para investor yang ingin melakukan ekspor produknya ke mancanegara. Konsep pengembangan Pelabuhan Muara Sabak itu terintegrasi dengan kawasan industri, penyiapan dan kelengkapan infrastruktur pendukung dan keunggulan biaya serta insentif investasi. Di samping itu, hinterland Pelabuhan Muara Sabak bukan hanya Provinsi Jambi, tetapi meliputi Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Pembangunan ini ke depan sangat perlu dipercepat penyelesaiannya karena sebagai pelabuhan modern, Pelabuhan Muara Sabak akan menjadi area pertumbuhan ekonomi wilayah, dimana pelabuhan ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas infrastruktur pendukung diantaranya jalan akses yang sebagian besar telah selesai, sarana telekomunikasi, ketersediaan listrik dan air yang akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, akan menciptakan pertumbuhan zona pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

8. Sementara itu dimasa datang untuk mendukung pergerakan barang dan jasa pada sangat perlu dibangun dan dikembangkan jalur angkutan sungai serta dermaga dan pos pengawas untuk memperlancar angkutan sungai, sehingga dapat mengurangi kepadatan angkutan jalan darat yang umumnya dilalui kendaraan bertonase tinggi yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan di Provinsi Jambi. Saat ini 12 dermaga telah dibangun untuk melakukan bongkar muat barang, antara lain dermaga ponton Jambi, Dermaga Muara Bulian , Dermaga Muara Tembesi, Dermaga Tebo, Dermaga Pauh, Dermaga Sarolangun, Dermaga Suak Kandis, Dermaga Sungai Puding , Dermaga Rantau Rasau, Dermaga Nipah Panjang, Dermaga Teluk Buan, dan Dermaga Sungai Lokan. Di Samping Dermaga, untuk menjaga kelancaran dan ketertiban dalam kegiatan lalu lintas angkutan sungai, maka terdapat

dua Pos Pengawas lalu lintas sungai di Provinsi Jambi, yaitu Pos Pengawas LLASD Rengas dan Pos Pengawas LLASD Sengeti.

9. Di era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan daya saing daerah. Sampai tahun 2003 untuk melayani informasi sejumlah 2.569.598 jiwa penduduk Jambi, sarana informasi yang tersedia masih kurang dan sangat jauh dari memadai terutama di sentra-sentra produksi yang sangat membutuhkan layanan informasi dan komunikasi. Kurangnya sarana ini tercermin dari minimnya jumlah fasilitas komunikasi yang ada di Provinsi Jambi yaitu telepon hanya 57.258 pelanggan, telepon Umum 120 bh, wartel 2.115 unit dan warnet hanya 619 unit. Berdasarkan fakta ini, ke depan pengembangan telematika di Provinsi Jambi dihadapkan pada disamping terbatasnya ketersediaan infrastruktur telematika, juga tidak meratanya penyebaran infrastruktur telematika di berbagai kabupaten. Dari fasilitas telekomunikasi yang ada, pelayanannya kebanyakan di wilayah perkotaan dan itupun sebahagian besar baru melayani instansi pemerintah. Keadaan ini disebabkan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur telematika dengan belum berkembangnya sumber pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur telematika seperti kerjasama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat; dan kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika. Saat ini rendahnya kemampuan masyarakat Provinsi Jambi untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan digital dengan daerah lainnya terutama dengan Pulau Jawa.

E. Politik

1. Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut, format politik ini terumuskan

juga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kuran Demokratisasi yang telah dibuka telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Provinsi Jambi, hal ini terbukti dari terbentuknya kepengurusan daerah 24 partai politik sebagaimana yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Partisipasi juga terlihat dari penggunaan hak pilih dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilihan presiden secara langsung. Meskipun demikian belenggu otoritarian yang berjalan cukup lama mengakibatkan budaya politik demokrasi tidak berkembang secara sehat.

2. Dalam konteks pemerintahan di daerah, demokratisasi telah pula diperkuat dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pada intinya mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten, dan kota, atau Provinsi dan Kabupaten dan kota. Dengan berlakunya peraturan tersebut pemilihan Kepala Daerah yang selama ini menjadi kewenangan DPRD beralih pada rakyat untuk memilih kepada daerahnya secara langsung. Meskipun demikian otonomi luas juga membawa berbagai implikasi politik di daerah yang dapat mengarah pada terjadinya konflik horizontal.
3. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembang kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan serta peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangannya peran partai politik dan masyarakat sipil serta kebebasan pers dan media yang telah jauh berkembang, baik

dengan berdirinya berbagai media masa daerah maupun dengan meningkatnya jangkauan dan akses masyarakat Provinsi Jambi terhadap pers nasional dan internasional. Meningkatnya jumlah pers juga diikuti dengan peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian pembangunan pers masih juga dihadapkan dengan persoalan profesionalisme pers dan jangkauan akses masyarakat terhadap media masa.

F. Ketenteraman dan Ketertiban

1. Upaya peningkatan kegiatan Tramtibmas telah menghasilkan kondisi Tramtibmas yang semakin kondusif dalam menunjang kegiatan pembangunan daerah, namun berbagai gangguan Tramtibmas masih juga ditemui dalam berbagai bentuknya, hal ini terlihat dari perkembangan berbagai indikator kriminalitas di Provinsi Jambi selama 1999 sampai dengan 2003 sebagai berikut : *crime total* (jumlah kejahatan keseluruhan) meningkat 36,65% *Crime Indek* (bentuk kejahatan dengan indikator kejahatan yang meresahkan masyarakat : Curat, Curas, Curanmor, anirat, dan pembunuhan) meningkat 48,08% dan *Crime rate* meningkat menjadi berjumlah 19,23% serta semakin singkatnya *Crime o' Clock* (selang waktu terjadinya kejahatan) dari 4,31 di tahun 1999 menjadi 3.33 pada tahun 2003. Peningkatan jumlah kriminalitas juga diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan non konvensional dan kejahatan-kejahatan konvensional dengan modus baru.
2. Secara kelembagaan Polri merupakan pemegang kewenangan utama dalam upaya peningkatan Tramtibmas, namun seiring dengan otonomi daerah pemerintah daerah telah pula membentuk Kepolisian Pamong Praja sebagai organ pengamanan di samping masih kuatnya peran masyarakat dalam berbagai bentuknya.

G. Hukum dan Aparatur

1. Sebagai konsekuensi dari digulirkannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, juga mengacu pada produk hukum daerah, yang terdiri dari peraturan daerah (Perda), Keputusan Kepala Daerah (KKD), dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Selain itu di berbagai daerah juga masih berlaku hukum adat, sehingga kedudukan peraturan perundang-undangan daerah menjadi semakin penting. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan di Provinsi Jambi, selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 telah dikeluarkan sebanyak 63 Peraturan Daerah dengan 2.606 Keputusan Kepala Daerah meliputi berbagai aspek urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi masing-masing juga telah mengeluarkan Perda. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 telah dikeluarkan tidak kurang dari 465 perda dari 10 kabupaten dan kota. Meskipun demikian berkenaan dengan materi muatannya maupun proses pembentukannya, serta penegakannya masih banyak ditemui berbagai permasalahan. Dari sisi proses pembentukannya ditemui persoalan berbagai persoalan antara lain : a) kecilnya alokasi anggaran untuk bidang hukum; b) kurangnya tenaga legal drafter dalam penyusunan raperda di setiap Biro/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi; c) belum adanya kajian mendalam terhadap Raperda yang diajukan oleh masing-masing Biro/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi ; d) belum adanya program Legislasi Daerah (PROGLEDA) dan skala prioritas penyusunan peraturan daerah lima

- tahunan: e) masih kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perda; f) Belum terjalinnya secara sistematis koordinasi antar Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi ; g) orientasi pada kepentingan menggali Pendapatan Asli Daerah, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan h) belum mengadopsi nilai-nilai lokal (adat dan hukum Islam).
2. Mengenai keberadaan hukum adat dalam tata kemasyarakatan dan pemerintahan, sesungguhnya memainkan peran yang cukup penting dalam kehidupan, sehingga ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sudah terdapat lembaga adat, namun eksistensi hukum adat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tata pemerintahan semakin melemah. Hal ini akibat dari kurangnya perhatian dan upaya pembinaan, pengembangan, pengkajian dan sosialisasi hukum adat serta menjadikan hukum adat sebagai acuan dalam pembentukan Perda.
 3. Peningkatan kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam penegakan pengembangan budaya dan penegakan hukum, namun kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum, masih belum banyak kemajuan yang tercapai.
 4. Dalam rangka meningkatkan budaya hukum (kesadaran dan ketaatan hukum) telah banyak kegiatan yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jambi dan juga perguruan tinggi. Untuk itu tidak kurang dari 1.856 kegiatan telah dilakukan selama tahun 1999-2003. Dari kegiatan yang telah dilakukan telah menunjukkan adanya peningkatan budaya hukum, meskipun demikian masih juga ditemui berbagai pelanggaran hukum. Hal ini tercermin dari jumlah kasus yang masuk ke pengadilan, selama tahun 1999-2003 telah masuk dan diputus sejumlah 17688 perkara pidana, dan 1233 perkara perdata.

5. Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah telah dilakukan berbagai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, baik melalui peningkatan jenjang pendidikan maupun kemampuan pendidikan dan latihan teknis fungsional. Pada tahun 2004 tercatat sejumlah 5.626 orang PNS, terdiri dari 73 orang PNS golongan I, 1749 orang PNS golongan II, 3461 orang PNS golongan III, dan 343 orang PNS golongan IV. Dari jumlah dan pendidikan aparatur ditingkat provinsi sebenarnya cukup memadai. Namun masih ditemui berbagai persoalan seperti penyebaran antara daerah belum proporsional; tingkat kesejahteraan PNS relatif masih rendah; masih rendahnya layanan pemerintah daerah terlihat dari rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diberbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat, seperti sarana dan prasarana jalan raya, pendidikan, kesehatan, dan sarana dan prasarana dasar lainnya, dan masih tingginya angka pelanggaran kewenangan, hal ini terlihat dari jumlah temuan Banwasda Provinsi Jambi tahun 1999-2003 mencapai 705 temuan untuk instansi Provinsi dan 2.994 temuan untuk instansi kabupaten kota.

H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Untuk Provinsi Jambi upaya-upaya pembangunan wilayah yang relatif masih tertinggal, walaupun telah dimulai dalam dua dekade terakhir namun sampai saat ini masih banyak dijumpai wilayah-wilayah tertinggal yang belum tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya terutama daerah perkotaan. Keadaan kabupaten. Keadaan ini akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan sehingga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jambi. Sampai tahun 2004 jumlah penduduk miskin masih mencapai 12,45% dari jumlah penduduk atau mencapai 325.000 jiwa. Dengan demikian

untuk kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal termasuk komunitas adat terpencil (KAT) atau suku anak dalam (SAD) yang umumnya tergolong miskin ini memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil (KAT) antara lain: (1) sangat minimnya sarana perhubungan yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) menyebarnya tempat tinggal penduduk dengan kepadatannya yang relatif rendah; (3) Kebiasaan hidup berpindah (melangun) khususnya bagi komunitas adat tertinggal (KAT) atau suku anak dalam (SAD) yang hidup mengembara pada wilayah tertentu di hutan-hutan provinsi Jambi. (4) miskinnya wilayah-wilayah ini dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia; (5) pembangunan di wilayah tertinggal belum diprioritaskan oleh pemerintah (6) dukungan sektor terkait belum optimal untuk pengembangan wilayah-wilayah tertinggal ini.

2. Untuk Provinsi Jambi cukup banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan (sawit, karet, kelapa dan casiavera dan tanaman pangan) serta lokasinya yang strategis, namun belum dikembangkan secara optimal seperti contohnya Kecamatan Jangkat dengan produk unggulannya kentang dan kopi. Hal ini disebabkan antara lain: (1) lemahnya penguasaan teknologi dan terbatasnya informasi pasar dan untuk pengembangan produk unggulan; (2) belum berkembangnya jiwa kewirausahaan dari petani dan sikap profesionalisme dari pelaku dunia usaha; (3) dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta belum optimal; (4) infrastruktur kelembagaan sosial dan ekonomi yang berorientasi untuk pengembangan usaha belum berkembang; (5) koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan masih lemah untuk meningkatkan daya saing produk unggulan; (6)

keterbatasan akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran untuk pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi; (7) prasarana dan sarana fisik (jalan-jalan ke sentra produksi dan ekonomi) untuk mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah sangat terbatas; serta (8) kerjasama antar kabupaten untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan belum optimal. Pada hakekatnya wilayah-wilayah yang strategis ini dapat tumbuh lebih cepat karena memiliki produk unggulan, dan diharapkan setelah wilayah ini berkembang dapat memicu pertumbuhan wilayah-wilayah sekitarnya yang masih tertinggal karena miskin sumberdaya dan masih terbelakang.

3. Pesatnya aktivitas pembangunan terutama di perkotaan telah membawa dampak yang negatif baik secara fisik (penurunan kualitas lingkungan, konversi lahan pertanian) maupun permasalahan sosial ekonomi. Untuk kedepan Provinsi Jambi harus mengantisipasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan di perkotaan tersebut. Dampak tersebut antara lain adalah; (1) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan telah dilakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alamnya sehingga menurunnya kualitas lingkungan fisiknya dan timbulnya polusi; (2) meningkatnya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, dan industri; (3) terjadinya penurunan kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan.
4. Secara umum untuk Provinsi Jambi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Keadaan ini disebabkan kecenderungan investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Selain dari pada itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah pedesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pedesaan (*trickling down effect*) justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan pedesaan (*backwash effects*).

5. Untuk Provinsi Jambi pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan bahkan cenderung agresif dan eksploitatif sehingga menurunkan kualitas (*degradasi*) dan kuantitas (*depleksi*) SDA dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik antar kehutanan dan pertambangan. Salah satu penyebab terjadi permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan "*Rencana Tata Ruang*" sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Untuk Provinsi Jambi telah terjadi penyimpangan pemanfaatan dan pengendalian ruang RTRW Provinsi Jambi karena a). Tumpang tindihnya pengalokasian ruang baik untuk perkebunan besar maupun HTI seperti terlihat di kecamatan Tungkal Ulu bagian selatan, Mendahara Selatan dan Muara Bulian. b). Tumpang tindihnya pengalokasian ruang untuk perkebunan besar dengan pemukiman transmigrasi dan Hutan Lindung gambut seperti Pamenang, Tungkal Ulu, Mendahara dan Kuamang Kuning. c). Tumpang tindihnya areal HPH dengan kawasan lindung, sehingga diperkirakan beberapa areal HPH yang telah memasuki kawasan hutan lindung seperti di kecamatan Muara Siau, Jangkat, Batang Asai, Kumpeh. Hal ini berarti perlu dilakukan peninjauan kembali dengan mengakomodasikan perubahan-perubahan tersebut, baik perubahan ekonomi, asumsi-asumsi, strategi

maupun arah kebijakan dalam pengelolaan ruang wilayah dengan mewujudkan pola dan struktur tata ruang yang baru.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Telah diketahui hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Untuk Provinsi Jambi dalam menopang aktivitas pembangunannya sangat tergantung pada hasil eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya. Sampai saat ini, sumber daya alam khususnya pertanian sangat berperan sebagai sumber perekonomian daerah, dan masih sangat signifikan perannya untuk 20 tahun mendatang. Hal ini dapat diperkirakan dengan masih cukup tingginya kontribusi sektor pertanian seperti tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memberikan kontribusinya sampai 28,29 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi pada tahun 2004, dan menyerap cukup banyak tenaga kerja atau 60% dari total angkatan kerja yang ada. Namun untuk Provinsi Jambi, secara umum pengelolaan SDA yang dikelola masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cenderung agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga daya dukung lingkungan menurun. Ketersediaan SDA menipis, bahkan cenderung sudah berada pada tahap yang sangat meguatkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini masih sangat maraknya kejadian pembalakan liar (*illegal logging*), tebang berlebih (*over cutting*) serta penyeludupan kayu ke luar negeri yang telah mempercepat pengurangan sebahagian besar hutan di Provinsi Jambi. Kejadian ini berakibat pada laju penurunan luas hutan yang cukup signifikan di Provinsi Jambi yang mencapai -2,44% per tahun dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Kalau

pada tahun 1991, luas kawasan hutan Provinsi Jambi mencapai 2.888.718 ha maka pada tahun 2003 menurun menjadi 2.148.950 ha. Dalam kurun waktu 13 tahun telah terjadi penurunan kawasan seluas 739.768 ha. Kondisi ini juga berimplikasi pada degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) yang diakibatkan kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai Batanghari dan anak-anaknya semakin menurun. Kejadian ini sangat berdampak pada meningkatnya debit air sungai secara tidak terkendali di musim hujan. Hal ini berakibat pada meningkatnya frekwensi banjir sepanjang tahun. Seringnya banjir sangat berdampak pola tanam dan sangat berpengaruh pada produktivitas hasil pertanian masyarakat. Bahkan tidak jarang tingginya frekwensi banjir yang datang secara tiba-tiba telah menghancurkan sumber kehidupan (pertanian) yang merupakan sumber ekonomi dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Jambi.

2. Praktik penebangan liar dan konversi lahan perkebunan di Provinsi Jambi juga telah menimbulkan dampak yang sangat luas pada ekosistem dalam tatanan DAS. Pada saat ini diperkirakan DAS Batanghari sudah berada dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS ini juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaannya yang masih lemah. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, industri dan konsumsi rumah tangga.
3. Karena Pengeloan yang tidak berkelanjutan satu demi satu perusahaan HPH itu berguguran. Memasuki tahun 2001 tinggal 14 perusahaan HPH di Provinsi Jambi. Namun pada pertengahan 2003, hanya ada dua perusahaan HPH yang masih aktif, sedangkan hutan tanaman Industri (HTI), dari 10 perusahaan, hanya tiga yang masih aktif. Hak Pengusahaan hutan yang sekarang tidak beroperasi lagi kini meninggalkan permasalahan yang kompleks. Pada HPH dan HTI yang

tidak beroperasi ini lahan yang ditinggalkan rawan perambahan dan menjadi persoalan tersendiri sehingga perlu dipikirkan dimasa mendatang. Disamping itu banyaknya lahan-lahan tak bertuan yang kondisinya tidak memungkinkan lagi sebagai daya dukung satwa liar dan fungsi ekologis yang baik. Tidak adanya pengelolaan yang baik akan semakin memperparah kondisi mengingat perlu waktu dan biaya yang sangat besar untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Untuk ke depan rehabilitasi Ex HPH ini sangat mendesak dilakukan untuk mengembalikannya sebagaimana fungsi hutannya seperti semula.

4. Permasalahan lainnya dalam pengelolaan hutan ini adalah masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan dalam pengusahaan dan penataan batas kawasan hutan. Masyarakat lokal (adat) yang banyak berada di sekitar kawasan hutan dan di dalam juga merupakan potensi yang baik sekaligus menjadi potensi permasalahan jika dalam pengelolaan hutan tersebut di abaikan, sehingga yang muncul adalah klaim terhadap lahan hutan. Permasalahan yang muncul tersebut sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari pemerintah sendiri sebagai pemegang otoritas kebijakan. Sebagai contoh permasalahan yang terjadi adalah penunjukkan suatu kawasan menjadi hutan konservasi atau hutan lindung seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat setempat. Tanpa ada pengakuan partisipasi masyarakat setempat sulit terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.
5. Sumberdaya alam Provinsi Jambi lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah daerah Kawasan pesisir dan laut. Dengan diterapkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, luas perairan pesisir Provinsi Jambi mencapai 12 mil laut dari garis pantai Pulau Berhala. Di perairan yang cukup luas ini hidup beraneka ragam sumberdaya hayati yang berpotensi sebagai lahan budidaya ikan juga terdapat potensi hutan mangrove dengan jenis bakau, pidada, serta jenis lainnya yang sangat potensial untuk menjaga kondisi pantai dari erosi air laut. Sumberdaya kelautan dan pesisir di Provinsi Jambi tersebar di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas lautan Provinsi Jambi mencapai 425,5 km² telah menghasilkan 51.426 ton ikan tahun 2004. Kegiatan perikanan laut telah memberikan lapangan kerja bagi 3.159 orang yang terdiri dari nelayan penuh 2.053 orang, nelayan sembilan utama 631 orang dan sambilan tambahan 474 orang. Sesuai dengan luas wilayah perairan, jumlah nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 2.144 orang atau 66,91% dari total nelayan Provinsi Jambi. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah Ekosistem pesisir dan laut semakin rusak dan terjadinya pencurian ikan serta penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Untuk ke depan sangat diperlukan upaya meningkatkan konservasi pesisir dan laut, serta rehabilitasi ekosistem yang rusak. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut. Di samping itu penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir juga sangat penting diperhatikan untuk 20 tahun ke depan.

6. Proses pembentukan Pegunungan Bukit Barisan melalui akibat penunjaman Kerak Samudra Indo-Australia ke Kerak Benua Eurasia mengakibatkan terangkatnya batuan-batuan tua berumur Mesozoikum (65 juta tahun yang lalu) dengan beragam batuan. Kemudian melalui proses geologi berupa aktifnya gunung api yang menerobos batuan-batuan yang lebih tua membawa kepada dampak terbentuknya cebakan-cebakan mineral ekonomis yang berdekatan dengan Pegunungan Bukit Barisan ini. Beberapa di antaranya adalah potensi mineral-mineral tembaga, timbal, emas, perak, dan sebagainya yang tersebar di antara G. Nagan dan G. Patahsembilan di Kabupaten Bungo. Pegunungan Bukit Barisan memegang peranan penting di dalam menjaga lingkungan secara keseluruhan di Provinsi Jambi. Status sebagai Taman Nasional yang berada di Pegunungan Bukit Barisan adalah bagi Provinsi Jambi sudah sangat tepat karena dengan status ini sumberdaya air dan

lingkungan relatif akan terjaga dengan baik. Namun demikian karena di kawasan ini juga kemungkinan besar mengandung cadangan mineral ekonomis tinggi, maka pada masa depan perlu dipikirkan untuk menilai cadangan ini sebagai tabungan masa depan, setelah cadangan-cadangan di tempat lain menurun kuantitas dan kualitasnya.

7. Namun suatu hal yang perlu diwaspadai terhadap hasil eksploitasi bahan tambang ini adalah terjadinya penurunan hasil tambang sejak beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terlihat dari jumlah hasil minyak mentah yang dihasilkan dari tahun 2000 mencapai 8.905.570 barrel turun menjadi 4.108.653 barrel tahun 2003. Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas alam dari 667.465 MMBTU tahun 2000 menjadi hanya 27.020 MMBTU tahun 2003. Sedangkan produksi batu bara juga terjadi penurunan dari 60.585 ton tahun 2000 menjadi hanya tinggal 8.206 ton tahun 2003. Fenomena terjadinya penurunan produksi hasil tambang ini perlu dialami dan dipertanyakan apakah hal ini disebabkan memang cadangan hasil tambang kita yang mulai menipis sehingga hasil tambang menurun secara signifikan. Atau saat ini tidak banyak lagi dilakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber tambang baru karena adanya peraturan yang tidak mendukung, dimana dalam pencarian sumber tambang baru terutama minyak bumi yang masih berada pada tahap eksplorasi perusahaan (calon investor) telah dikenakan pajak sehingga hal ini menjadikan beban yang cukup berat bagi pengusaha untuk melakukan eksplorasi di Provinsi Jambi.
8. Sampai saat ini pencemaran air dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat. Keadaan ini karenakan semakin pesatnya aktivitas pembangunan, ekonomi dan pemanfaatan SDA yang kurang memperhatikan aspek kelestarian kehidupan dan fungsi lingkungan. Salah satu indikasinya untuk Provinsi Jambi adalah dengan masih beroperasinya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang DAS Batang hari dan anak-anak sungainya. Aktivitas PETI dengan "air raksa atau Mercury" ini disamping akan mencemari air sungai yang sangat

dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari sebagian besar masyarakat Jambi, juga dengan aktivitas PETI ini akan dapat mencemari air untuk kegiatan pertanian dan perikanan disepanjang sungai Batang Hari. Disamping itu desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan SDA baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang agar Jambi tidak mengalami krisis SDA, khususnya krisis air, Krisis Pangan, dan krisis energi.

II.2.TANTANGAN

A. Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian daerah 20 tahun mendatang adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang lebih maju.
2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana persaingan ekonomi antar daerah dan regional semakin kompetitif dan pesat serta semakin meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi daerah yang masih banyak mengandalkan murahnya upah tenaga kerja dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, ke depan perlu diubah menjadi perekonomian daerah yang mengandalkan keterampilan SDM serta produk-produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing. Perkembangan ekonomi

daerah di kawasan regional dan kawasan segitiga pertumbuhan Singapura, Batam dan Johor (Sibajo) yang pesat dengan kekuatan ekonomi Singapura dan Malaysia merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian daerah. Dengan demikian, integrasi perekonomian daerah ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.

3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana pertambahan penduduk Jambi masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produksi diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 55 persen dari total penduduk) pada periode sekitar 2015-2025. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dan kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian daerah di masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar tersedia tambahan lapangan kerja yang layak bagi mereka.
4. Tantangan penurunan kontribusi sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terus menurun. Potensi sektor kehutanan yang terus menurun dihadapkan pada tingkat deforestation yang relatif tinggi. Tingkat kerusakan hutan yang relatif parah pada saat ini, berpengaruh pada aspek lingkungan, seperti banjir dan kekeringan serta tingkat ketersediaan kayu untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar lainnya. Kondisi ini berpengaruh pada aktivitas ekonomi, terutama keterkaitan sektor hilir dari industri perkayuan yang memberikan multiplier yang relatif besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

5. Tantangan dalam meningkatnya nilai tambah (added value) dan daya saing produk saing produk pertanian. Pengembangan subsistem agribisnis hilir (Down stream agribisnis) yang sinergi adalah upaya meningkatnya nilai tambah (added value) dan daya saing produk pertanian di provinsi Jambi. Kontribusi sektor pertanian yang relatif besar selama dekade pembangunan Provinsi Jambi, menjadikan sektor pertanian terutama subsektor perkebunan menjadi dasar yang kuat yang harus dikembangkan kedepan. Rendahnya nilai tambah sektor pertanian, menuntut suatu upaya peningkatan industri hilir sistem agribisnis, sehingga dapat menghasilkan produk akhir pertanian yang berkualitas yang berdaya saing.
6. Tantangan dalam perkembangan subsistem pemasaran (On-Farm agribisnis) yang dapat menunjang peningkatan penjualan. Pendayagunaan sistem informasi, pendayagunaan dan penciptaan pasar dalam negeri. Mengembangkan subsistem Jasa Penunjang (Supporting Institution) sehingga dapat mendukung peningkatan produk pertanian terutama yang ekspor.
7. Tantangan internal penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di kota Jambi, sehingga dapat melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Ke depan, perekonomian daerah juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah Provinsi Jambi dengan mendorong perkembangan ekonomi terutama di daerah hinterland Kota Jambi. Kebijakan ini bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan terutama di kota Jambi, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Jambi.

8. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan di dalam mengembangkan potensi masyarakat dan daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kepentingan utamanya adalah mengurangi ketergantungan perekonomian daerah dari pengaruh luar namun tetap berdaya saing. Dengan pemahaman ini, tantangan utamanya adalah mengembangkan aktivitas perekonomian daerah yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar bagi daerah.
9. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat.

B. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam 20 tahun mendatang, Provinsi Jambi sebagaimana halnya wilayah lain di Indonesia akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 2.644.135 orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 3.509.531 orang pada tahun 2025. Hal ini terjadi seiring dengan akan perbaikan berbagai parameter kependudukan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Di samping itu potensi dan kemajuan

yang ditunjukkan daerah Jambi juga akan menjadi daya tarik masyarakat di luar Provinsi Jambi untuk bermigrasi ke Provinsi Jambi. Oleh karena itu pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing dan kesejahteraan rakyat. Disamping itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

2. Masih rendahnya IPM Provinsi Jambi, menunjukkan rendahnya kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi. Hal ini berdampak terhadap produktivitas dan daya saing daerah. Oleh karena itu pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM.
3. Di bidang kesehatan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi adalah tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi; tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender, dan kelompok pendapatan; dan terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Sementara itu juga dihadapkan pada persoalan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan.
4. Dalam bidang pendidikan tantangan yang dihadapi adalah dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat

pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin. Masih rendahnya kualitas dan relevansi lulusan, menuntut peningkatan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin, sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, termasuk dalam mengembangkan akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur serta meningkatnya daya saing. Tantangan selanjutnya yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat.

5. Masih tertinggalnya peran perempuan dan rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, antara lain ditandai oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tantangan lain adalah masih rendahnya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Di sisi lain partisipasi pemuda dalam pembangunan masih belum optimal, serta budaya dan prestasi olahraga masih rendah. Di samping itu, beban permasalahan kesejahteraan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya akses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta terjadinya berbagai bencana sosial dan bencana alam. Sementara itu, kebutuhan sosial dasar masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi.
6. Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan budaya nasional menjadi masalah ketika dihadapkan pada desakan arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, oleh karena itu menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap

keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai universal.

7. Dibidang kehidupan beragama tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan ajaran agama yang mampu sebagai inspirasi dan sumber inspirasi serta ajaran moral untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun, mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Untuk 20 tahun ke depan di Provinsi Jambi tantangan yang perlu diantisipasi adalah terjadinya persaingan yang makin tinggi yang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) terutama sektor pertanian (agroindustri). Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek daerah, maka tantangan yang dihadapi untuk Provinsi Jambi terutama di bidang agribisnis adalah meningkatkan kontribusi iptek di sector Hulu dalam penyediaan bibit (up stream) dan budidaya (on farm) untuk peningkatan produksi dan produktivitas serta hilir (down stream) untuk melakukan processing terhadap semua produk primer seperti contohnya crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng dan margarine untuk meningkat added value dan value chain suatu produk sehingga masyarakat Jambi terutama petani dapat menikmati hasil peningkatan nilai tambah produk ini.
2. Disamping tantangan di bidang pemanfaatan IPTEK dalam bidang pertanian, selaras dengan sangat pesatnya perkembangan IPTEK di bidang lainnya seperti telekomunikasi, transportasi, kesehatan, Industri (jasa, perbankan) juga perlu diantisipasi ke depan bagaimana memanfaatkan kemajuan IPTEK yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap aktivitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (better life). Tantangan

pemanfaatan IPTEK dalam pelayanan publik dalam birokrasi, tantangan ke depan bagaimana kita memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi (IT) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui *paperless document* dengan prosedur yang cepat dan murah sehingga membantu menciptakan sistem birokrasi yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan tantangan pemanfaatan Iptek bagi pendidikan adalah bagaimana tersedianya akses terhadap *Cyber-net (internet)* dalam semua jenjang pendidikan sehingga dapat memberikan percepatan pengembangan kualitas SDM di Provinsi Jambi. Sedangkan dibidang kesehatan tantangan yang harus dihadapi untuk 20 tahun mendatang adalah seiring dengan semakin membaik tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Jambi, maka permintaan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan prima juga akan semakin meningkat. Pelayanan kesehatan yang prima sangat identik dengan sistem pelayanan yang prima dan tersedianya peralatan dan fasilitas kesehatan yang canggih dan representatif sejalan dengan kemajuan IPTEK. Untuk ke depan tantangan dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang modern sangat perlu dihadirkan di Jambi sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke pusat ibukota dan provinsi tetangga.

3. Untuk Provinsi Jambi kondisi kemajuan IPTEK di berbagai bidang ini perlu disikapi terutama bagi masyarakat dan para pengguna hasil IPTEK sehingga tidak terjadi ketidaksiapan (kegagapan) teknologi dalam pemanfaatan IPTEK atau lebih ironis lagi ada kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh kemajuan IPTEK sama sekali. Dengan demikian tantangan kedepan pemberian akses terhadap semua bidang kemajuan IPTEK bagi masyarakat Provinsi Jambi mutlak dilakukan dimasa mendatang.
4. Disamping itu tantangan lainnya ke depan lebih untuk berperannya IPTEK dalam memberikan kehidupan yang lebih mudah dan lebih baik (*better life*) maka perlu dimasa datang dilakukan peningkatan efektifitas

mekanisme intermediasi iptek, memperkuat sinergi kebijakan iptek di kalangan masyarakat, meningkatkan peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

D. Sarana dan Prasarana

1. Kemajuan teknologi di abad informasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan akses telekomunikasi menuntut adanya penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan telematika. Walaupun pembangunan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan. Informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa di Provinsi Jambi.
2. Untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk Provinsi Jambi, tantangan yang dihadapi adalah :
 - (a) memenuhi penyediaan kebutuhan rumah terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki rumah;
 - (b) menyempurnakan pola subsidi menuju subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkepastian, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah;
 - (c) mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha guna berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan
 - (d) melakukan perkuatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, namun juga melibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Dengan semakin berkurangnya sumber dana dari pemerintah, tantangan ke depan yang dihadapi adalah memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerjasama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana. Penyempurnaan juga perlu dilakukan di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan diberbagai lembaga keuangan. Kerjasama dengan badan usaha terutama ditujukan untuk:
(a) menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri, serta pergerakan penumpang dan barang dan jasa; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; dan (d) memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat; (e) meningkatkan jumlah irigasi untuk pertanian.

E. Politik

1. Dalam pembangunan politik di daerah tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, proses politik dan budaya politik demokratis agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan.
2. Pada lingkup pemerintahan daerah, konsolidasi demokrasi perlu di dukung dengan kebijakan daerah yang reformis dan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas, dan mandiri serta baik dan bersih. Disamping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum cukup besarnya kapasitas kelas menengah yang dibutuhkan bagi pembangunan masyarakat madani, baik dari segi ekonomi maupun

pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan demokrasi.

3. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa yang profesional. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, menjadikan pers sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

F. Keamanan, Ketertiban dan ketentraman Masyarakat

Kedepan upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor kriminogen bagi timbulnya gangguan trantibmas, masih tingginya kriminalitas yang terjadi di wilayah yang sulit dijangkau oleh penegak hukum seperti di hutan berupa illegal logging dan penambangan emas tanpa izin. Begitu juga terhadap gangguan Kamtibmas di laut seperti perambahan kekayaan laut maupun pencurian dengan kekerasan (bajak laut/perampokan) di laut sementara masih ditemui keterbatasan sarana dan prasarana serta aparat. Di sisi lain peningkatan jumlah kriminalitas juga diikuti dengan berkembangnya kejahatan non konvensional dan kejahatan konvensional dengan modus baru.

G. Hukum dan Aparatur

1. Tantangan ke depan di dalam pembangunan hukum di daerah adalah dalam mewujudkan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.

2. Sampai saat ini, birokrasi di pemerintahan daerah belum banyak mengalami perubahan yang fundamental. Permasalahan yang ada belum terselesaikan, di sisi lain muncul pula masalah baru seiring dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Partisipasi masyarakat menjadi tema penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan daerah. Revolusi teknologi dan informasi akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Dengan menelaah kondisi SDA terutama sektor pertanian dan lingkungan yang menjadi tumpuan sumber pembiayaan pembangunan Provinsi Jambi sampai saat ini, jika tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapi tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi dalam 20 tahun ke depan. Ketiga krisis ini menjadi tantangan daerah Provinsi Jambi jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Jambi.

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, menurunnya kondisi irigasi dan prasarana irigasi. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai Batanghari menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta pasokan air untuk pertanian. Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi, karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, energi matahari.
3. Kemanjauan dapat diperoleh dengan memanfaatkan SDA daratan seperti kehutanan, pertambangan, dan pemanfaatan lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah geografis dengan provinsi tetangga. Alternatif lain adalah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber pesisir pantai Provinsi Jambi yang mencakup perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan sebagai tumpuan masa depan Provinsi Jambi.
4. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran

masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif dan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang yang memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, di samping upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing daerah.

II.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah keseluruhan sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan daerah provinsi Jambi dalam pembangunan daerah, yaitu: 1). Provinsi Jambi yang terletak ditengah pulau Sumatera yang membentang dari Bukit Barisan di bagian Barat, dataran rendah lahan kering tengah di bagian tengah hingga perairan laut dengan pulau Berhala di bagian Timur. Topografi Provinsi Jambi pada hakekatnya mewakili Topografi Indonesia yang merupakan sangat potensial untuk dijadikan modal dalam pembangunan Provinsi Jambi ke depan. Letak geografis Provinsi Jambi yang berlangsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan "Indonesia, Malaysia, Singapura-Growth Trainggle" memiliki keunggulan komperatif yang dapat dimanfaatkan menuju keunggulan kompetitif. Unggul banding letak geografis ini akan bermakna jika dimanfaatkan secara cerdas dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai terutama dalam

mendukung investasi disamping penyediaan SDM yang berkualitas dan bisa diandalkan dalam mengelola pembangunan. Posisi wilayah Provinsi Jambi yang strategis ini juga penting disadari, karena dengan posisi ini disamping merupakan kekuatan sekaligus juga kelemahan, dan memberikan peluang serta ancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan Provinsi Jambi di berbagai bidang, baik di bidang sosial dan budaya, ekonomi industri, wilayah, lingkungan hidup, maupun hukum dan aparatur pemerintah. 2) Sampai saat ini modal pembangunan Provinsi Jambi masih sangat tergantung pada kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki seperti bahan tambang yang bersifat ekstraktif seperti migas dan bahan tambang galian disamping sumberdaya alam lahan yang potensial untuk pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan. Sangat bertumpunya modal pembangunan Provinsi Jambi ini pada sumber daya alam ini menjadikan peringatan dini bagi kita dalam pemanfaatan sumberdaya alam ini harus didayagunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat Provinsi Jambi. 3). Penduduk dengan jumlah yang sampai pada tahun 2004 ini berjumlah 2.619.553 jiwa juga merupakan modal dasar dalam penyediaan tenaga kerja yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah Provinsi Jambi. 4). Dengan pernah terpilihnya provinsi Jambi sebagai provinsi yang aman beberapa waktu yang lalu juga sangat signifikan sebagai modal pembangunan Provinsi Jambi dimasa mendatang. 5). Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi, telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi, serta dengan lahirnya UU 32 tahun 2004 mengenai desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan juga sangat strategis sebagai modal dasar untuk menentukan arah pembangunan Jambi ke depan.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2005 – 2025

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Provinsi Jambi pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah :

JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA

Visi Pembangunan Provinsi Jambi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Provinsi Jambi tersebut harus dapat diukur dapat mengetahui tingkat **kemajuan, kemandirian keadilan dan kesejahteraan** yang ingin dicapai.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata yang diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut makmur, dan dengan demikian dikategorikan sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang tingkat kontribusi sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto maupun dalam penyerapan

tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang bersifat lokal dan regional maupun nasional dapat direndam oleh ketahanan ekonominya.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik tercermin dari produktivitas yang makin tinggi.

Selain indikator sosial ekonomi, daerah yang maju juga ditandai dengan sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan. Daerah yang maju juga ditandai oleh peranserta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam aspek politik, daerah yang maju pada umumnya adalah yang telah memiliki budaya demokrasi, warganya terjamin hak-haknya yang terjamin rasa keamanan dan ketentraman dalam hidupnya.

Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat daerah, regional dan nasional maupun dalam hubungannya dengan masyarakat internasional. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan

antar daerah, antar bangsa semakin kuat. Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenai bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Daerah yang mandiri adalah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain dari SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; pembiayaan pembangunan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), yang berarti sumber pembiayaan pembangunan daerah tidak semata-mata tergantung dari pembiayaan yang bersumber dari APBN, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok daerahnya. Apabila karena SDA tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain, sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan; dan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi nasional maupun ekonomi global.

Kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan dari perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu daerah atau bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budayanya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan,

baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pembangunan Provinsi Jambi bukan hanya untuk mencapai kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri menonjol pula dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, serta perlindungan dan persamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan wilayah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif** dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu, reformasi di bidang hukum dan aparatur.
2. **Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya** dengan jalan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, dan memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan daerah.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum** melalui peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang lebih kokoh;

memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan substansi hukum, struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskrimatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. **Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib** dengan memberi dukungan dalam memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan menggalang partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan swakarsa.
5. **Mewujudkan Pembangunan yang merata dan Berkeadilan** dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sara dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender.
6. **Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan** dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

BAB IV
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2005 – 2026

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Jambi yang maju, mandiri, adil dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan di masa mendatang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya tujuan tersebut, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

A. Terwujudnya daerah yang memiliki keunggulan kompetitif, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US\$ 5.000, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 2,5 persen.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur (*structure transformation*) ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas SDM, termasuk peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM Provinsi Jambi ditandai dengan meningkatnya IPM dan IPG, serta menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
4. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas, agro industri yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, serta jasa

yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

5. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan antar moda yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisiensi sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
6. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung pembangunan daerah.

B. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya, ditandai oleh :

1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran dan dinamis.
2. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dari meningkatnya peradaban, harkat dan martabat serta kearifan lokal, meningkatnya penghargaan terhadap keragaman budaya, termasuk kesenian daerah dan berorientasi iptek.

C. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum, ditunjukkan oleh :

1. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
2. Terbentuknya peraturan perundang-undangan daerah yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kearifan lokal, hirarkhi peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal, dan asas-asas hukum universal.

3. Membaiknya ketaatan dan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta semakin kokohnya supremasi hukum dan penegakan HAM yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

D. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib yang ditandai oleh :

1. Membaiknya kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang tercermin dari meningkatnya kualitas layanan terhadap korban; semakin efektifnya penanganan kejahatan dan pelanggaran serta menurunnya kejahatan dan pelanggaran.
2. Tertatanya sistem keamanan yang handal, meningkatnya profesionalisme dan etika aparat keamanan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

E. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan Berkeadilan ditandai oleh :

1. Semakin meratanya tingkat pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jambi
2. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah, kelompok dan gender.
3. Dapat dipertahankannya kemandirian pangan di tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
4. Dapat terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel dan terjangkau.

F. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ditandai oleh :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang semakin membaik. Hal ini tercermin dari terpeliharanya fungsi dan daya dukung lingkungan, terjaminnya rehabilitasi dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan berkelanjutan.
2. Lebih terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah daya saing daerah, serta sebagai modal pembangunan daerah.
3. Terjadinya peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

IV.1. MEWUJUDKAN DAERAH YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF.

Masalah daya saing dalam pasar internasional yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangannya tidak ringan terutama bagi daerah. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan kompetitif yang tinggi niscaya produk-produk dalam negeri (daerah) tidak akan mampu menembus pasar internasional. Oleh karena itu keunggulan Kompetitif adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Daerah yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, akan siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah provinsi Jambi, pembangunan jangka panjang diarahkan untuk : (a) memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; (b) membangun SDM berkualitas dan berdaya saing ; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; dan (d) membangun infrastruktur yang maju yang mampu mendukung kegiatan

perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah.

A. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif menuju kompetitif.

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi pasar. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar wilayah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan prima. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar; mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan, mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola SDA secara berkelanjutan.
2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan daerah dan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika pasar dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, menjaga kemandirian perekonomian daerah.
3. Memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur (structure transformation) ekonomi dan sosial masyarakat.
4. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah

yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga persaingan usaha secara sehat dan meningkatkan perlindungan konsumen, daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan, penguasaan dan penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan pengembangan perekonomian daerah.

5. Upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sinergitas pelaku usaha, pemerintah daerah, perbankan daerah serta organisasi dan anggota masyarakat dengan merupakan lingkungan kerja dari UMKM sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam memperkuat basis ekonomi daerah.
6. Memperkuat struktur industri daerah melalui dukungan kuat pemerintah daerah untuk menghilangkan praktik-praktik yang menciptakan ekonomi biaya tinggi, komitmen untuk memajukan potensi lokal, konsistensi program dan infrastruktur yang mendukung. Kesamaan pandangan guna memecahkan berbagai persoalan yang dialami industri daerah, tidak bersifat parsial dan berjangka pendek, tetapi sistematis dan berjangka panjang.
7. Optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
8. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang

efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

9. Pengembangan iptek untuk perekonomian daerah diarahkan dalam rangka mendukung daya saing daerah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas iptek di dalam kegiatan ekonomi.
10. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal dan informal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pasar kerja yang kompetitif, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui pengelolaan pelatihan dan program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan regional dan global.
11. Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan sarana pendukung lainnya.
12. Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi sektor primer di daerah. Hal ini merupakan faktor strategis untuk mendorong pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan

keterbelakangan dan ketahanan pangan. Semua ini harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era otonomi.

13. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan agribisnis dan industri perikanan yang dinamis dan efisiensi, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Hal ini dicapai melalui revitalisasi kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
14. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri berbasis agribisnis yang berdaya saing baik di pasar lokal, regional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi daerah. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh dan terintegrasi dalam

mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.

15. Agroindustri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif yaitu sebagai daerah yang mempunyai potensi SDA yang besar. Untuk itu pembangunan agroindustri selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) tahap utama :
 - (1) membangun landasan pertanian yang kokoh melalui pengembangan subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness);
 - (2) Mengembangkan subsistem usaha tani (on-farm agribusiness) melalui pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pemanfaatan teknologi yang unggul dan berkelanjutan (technoware);
 - (3) mengembangkan subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) yang dapat meningkatkan nilai tambah (added value) dan daya saing produk pertanian;
 - (4) mengembangkan subsistem pemasaran (on-farm agribusiness) yang dapat menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem informasi pasar baik lokal maupun ekspor;
 - (5) mengembangkan sistem jasa penunjang (supporting institution) sehingga dapat mendukung peningkatan produk pertanian terutama yang berorientasi ekspor.
16. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu pembangunan agroindustri membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar :
 - (1) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
 - (2) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya dan
 - (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain

meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas (*Metrologi, Sandardization, Testing and Quality/MSTQ*); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

17. Jasa, termasuk jasa konstruksi dan perbankan daerah, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing regional dan global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan standar praktik terbaik nasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM daerah dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.
18. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu meningkatkan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui : (a) peningkatan daya saing dan akses pasar ekspor (b) pengembangan spesifikasi lokal, standar produk barang dan jasa yang berkualitas ekspor yang didukung dengan ketersediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang representatif.
19. Perdagangan antar daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisiensi dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan ; (a) Berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat; (b) terintegrasi aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi lokal, (c) meningkatkan perdagangan antar wilayah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

20. Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya daerah yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan terkait dengan pengembangan budaya bangsa.
21. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdaya saing dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam agribisnis, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan daya saing industri melalui pengembangan rumpun agroindustri, penerapan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas SDM.
22. Sektor perbankan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan dalam mendukung perekonomian, termasuk peningkatan kontribusi Lembaga model venture dan permodalan madani dalam penguatan permodalan, sesuai dengan kebutuhan investasi dan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
23. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah mampu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin peningkatan nilai guna. Dalam rangka meningkatkan kemandirian

keuangan daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat dan pinjaman luar negeri perlu dikurangi secara proporsional, sementara sumber pendapatan asli daerah terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah.

B. Membangun SDM yang berkualitas dan Berdaya saing.

24. Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Jambi yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan IPG serta penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan penyebaran penduduk yang merata.
25. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

26. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan akhlak mulia dan kearifan lokal serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada HAM. Pembangunan pendidikan dengan memprioritaskan pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada keunggulan komperatif daerah. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
27. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat

kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

28. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

C. Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

29. Pengembangan iptek diarahkan untuk peningkatan kemampuan iptek dengan 1). Memberikan prioritas penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di provinsi Jambi, 2). Meningkatkan kapasitas dan kemampuan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek daerah, 3). Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat dalam pengembangan iptek 4) menumbuhkembangkan budaya iptek di tengah masyarakat. Di samping itu pembangunan IPTEK juga diarahkan untuk pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan rekayasa iptek bagi kesejahteraan

masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah melalui percepatan intermediasi IPTEK bagi penggunanya.

30. Pembangunan iptek juga diarahkan untuk 1) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas terutama mendukung pembangunan agribisnis disektor hulu (up stream), budidaya (on farm) dan hilir (down tream) sehingga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan, 2) Peningkatan ketersediaan energi melalui penciptaan dan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan, 3) mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan serta, 4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik yang prima, efisiensi dan efektif serta akuntabel.
31. Dukungan dalam pengembangan IPTEK diberbagai bidang di atas dilakukan melalui pengembangan SDM Iptek, dan pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset daerah yang selaras dengan kebutuhan daerah, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penguatan sistem inovasi (temuan teknologi baru) dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Disamping itu memberikan percepatan pengembangan IPTEK perlu diupayakan peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha, untuk penumbuhan industri baru berbasis produk penelitian.

D. Membangun Sarana dan Prasarana yang maju

32. Pembangunan transportasi daerah diarahkan 1). Untuk memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa untuk mendorong transaksi perdagangan 2). menciptakan jaringan pelayanan secara intern dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, 3). Mendorong seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan transportasi, 4). Menghilangkan segala

macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; 5). Mempertahankan keberpihakan pemerintah daerah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; 6). Menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan transportasi yang prima; 7). Mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang melalui peningkatan pembangunan prasarana jalan serta angkutan sungai.

33. Pembangunan Perumahan diarahkan pada 1). Peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. 2). Peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat, 3). Memfasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat. 4). Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir. Sedangkan penanganan persampahan dan drainase diarahkan 1). Meningkatkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, 2). Memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA); 3). Meningkatkan kualitas SDM pengelola persampahan melalui pendidikan, pelatihan dan perbaikan pelayanan kesehatan, 4). Meningkatkan kinerja pengelola TPA dengan sistem *sanitary landfill*.
34. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diarahkan 1). Memprioritaskan pembangunan jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat terutama di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah provinsi Jambi. 2). Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang ada dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan

dengan pemanfaatan teknologi pengembangan jalan. 3). Mensinkronkan keterpaduan sistim jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya. 4). Mengkoordinasikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. 5) Mengembangkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi serta SDM penyelenggara prasarana jalan, 6) Memprioritaskan pembangunan jembatan yang dapat memicu pengembangan wilayah dan membuka wilayah-wilayah yang terisolir di seluruh provinsi jambi.

35. Pembangunan air minum diarahkan 1) Meningkatkan akses masyarakat Jambi terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum 2) Meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder terhadap pentingnya peningkatan pelayanan terhadap air minum 3) Meningkatkan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum 4) Meningkatkan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan, pelatihan 5) mengurangi tingkat kebocoran baik teknis hingga mencapai ambang batas normal.
36. Pembangunan kelistrikan diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun pembangkit listrik tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Dengan dibangunnya sumber-sumber listrik diharapkan akan ditingkatkan tingkat ketersediaan listrik di Provinsi Jambi. Disamping itu pembangunan kelistrikan juga di arahkan dengan membangun jaringan infrastruktur listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk

kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata. Seiring dengan ini juga dilakukan upaya penurunan tingkat losses yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara.

37. Pembangunan telematika diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan digital.
38. Percepatan sarana prasarana juga diarahkan pada pembangunan fisik dan non fisik di daerah terpencil serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi dari dan ke daerah-daerah terpencil. Seiring dengan ini juga perlu ditingkatkan kualitas kehidupan suku terasing melalui peningkatan pengetahuan dasar dan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar. Dalam penataan pemanfaatan wilayah diarahkan pada reorientasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jambi, yang memperhatikan dampaknya terhadap keberadaan suku terasing dalam kawasan pembangunan.

E. Reformasi Hukum dan Birokrasi.

39. Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan sarana untuk melakukan pembangunan, mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sesuai dengan kopotensinya mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah juga diarahkan untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good governance) dengan aparat yang memiliki profesionalisme tinggi

dan mampu memberikan pelayanan prima, serta menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi.

IV.2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA.

Terciptanya kondisi masyarakat yang agamis, bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan beragama budaya akan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.

1. Pembangunan agama diarahkan untuk mewujudkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan diri pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan harmonisasi kehidupan internal dan antar umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang soleh, toleran, tenggang rasa, dan harmonis.
2. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan itu diupayakan merubah konsumtif menjadi budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui

kesenian daerah, olahraga didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek, material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek, kesenian daerah dan olahraga diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia. Pembangunan budaya juga dilakukan dalam rangka menanamkan penghargaan terhadap nilai-nilai keragaman budaya.

IV.3 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA HUKUM

Masyarakat yang demokratis yang berbudaya hukum adalah landasan penting untuk tercapainya pembangunan daerah yang maju, mandiri, adil dan sejahtera. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta transparansi. Sedangkan hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Ketaatan hukum akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokratis yang leboh kokoh; memperkuat peran masyarakat; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

1. Penataan peran pemerintah daerah dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian, kedewasaan dan penguatan peran masyarakat. Disamping itu, diarahkan pula pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik daerah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial, dan

- peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat.
2. Penataan proses politik di daerah yang dititikberatkan pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan : (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik; (b) Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media masa, keleluasaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat setiap warga berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
 3. Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media, dan nilai-nilai nasionalisme.
 4. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan : (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga, dan bertanggung jawab serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih luas dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di pelosok daerah.

5. Pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah diarahkan kepada upaya mewujudkan peraturan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan sarana untuk melakukan pembangunan, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Pembangunan materi peraturan perundangan-undangan daerah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas serta dapat menjamin terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia dan hirarkhi peraturan perundangan-undangan baik vertikal maupun horizontal, serta asas-asas hukum universal.
7. Pemantapan kelembagaan hukum daerah, meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum dalam mendukung kelembagaan hukum pusat agar lebih mampu mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan hirarkhi peraturan perundangan-undangan baik vertikal maupun horizontal serta asas – asas hukum universal.
8. Penerapan dan penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah hukum dan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
9. Peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dilakukan dengan ; (a) menyederhanakan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan; (b) melakukan deregulasi berbagai bidang dan (c) memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu.

- 10 Pengembangan budaya hukum sehingga tercipta ketaatan dan penghormatan masyarakat dan aparat pemerintah terhadap hukum dilakukan dengan melakukan : (a) penyuluhan hukum secara intensif, mengembangkan nilai-nilai hukum adat; (b) keteladanan tokoh panutan (c) penerapan dan pelayanan hukum secara adil; (c) dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
11. Pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan secara terencana yang disusun dalam program legislasi daerah (Prolegda).
- 12 Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur daerah dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan daerah terhadap prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik.

IV.4. MEWUJUDKAN KONDISI YANG AMAN, TERTIB DAN TENTRAM

Gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horizontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah di berbagai bidang pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan

daerah. Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penataan sistem keamanan yang handal, peningkatan kualitas aparat keamanan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

1. Penataan sistem keamanan dan ketertiban dilakukan dalam rangka membangun sistem keamanan terpadu yang berbasis masyarakat dengan membangun koordinasi dan kerjasama secara sinergis antara masyarakat, satuan linmas, polisi pamong praja, dan kepolisian sebagai inti.
2. Peningkatan kualitas aparat keamanan dan ketertiban dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional dan pemantapan kualitas moral dan etika,serta meningkatkan budaya disiplin diserta dengan peningkatan kesejahteraan.
3. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara : (a) membangun komunikasi yang efektif antara aparat keamanan dan masyarakat (b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dan (c) peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan (d) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IV.5.MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan yang dapat dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan ini akan dapat mengurangi gangguan keamanan dan konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan ini maka pembangunan di arahkan dengan :

- 1) Peningkatan percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas administrasi namun lebih menekankan keterkaitan mata rantai proses agroindustri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan produk unggulan daerah dengan mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar sektor (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk mendukung peluang investasi di daerah dan peluang berusaha.
- 2) Meningkatkan keberpihakan pemerintah provinsi Jambi untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunannya infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian kredit rumah, disamping itu juga diperlukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
- 3) Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah di Provinsi Jambi, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan (engine of growth) wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk untuk melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan karakteristik kota masing-masing.
- 4) Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan keterkaitan dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut

memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di perdesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

- 5) Pertumbuhan daerah perkotaan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan perkotaan yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui : (1) Penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga (2) Pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan serta peningkatan kemampuan pembiayaan daerah perkotaan dan (3) Revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membangun kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antarmoda.
- 6) Pembangunan perdesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan; peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi tepat guna, penggalian dan pengembangan potensi masyarakat (SDM) sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja, pengendalian harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
- 7) Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dapat sinergis, serasi dan seimbang.

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- 8) Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, demokrasi dan menghormati hak-hak adat. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun penyelesaian sengketa alternatif (diluar pengadilan).
- 9) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, penguatan lembaga legislatif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan SDA, pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
- 10) Peningkatan kerjasama antar daerah kabupaten/kota akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; menghilangkan ego pemerintah kabupaten/kota yang berlebihan, serta menghindari

timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jaringan antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.

- 11) Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam.
- 12) Pembangunan koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
- 13) Dalam rangka pembangunan yang berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, kelompok Suku Anak Dalam (Komunitas Adat Terpencil /KAT) dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.

- 14) Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
- 15) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada : (1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 16) Pengentasan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- 17) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan, penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

IV.6. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu untuk mewujudkan Jambi yang maju, mandiri adil dan sejahtera, SDA dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan maka pelaksanaan dan kegiatan pembangunan diarahkan :

1. Pendayagunaan SDA yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk direhabilitasi dan dipulihkan daya dukungnya. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkan kembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
2. Dalam pengelolaan SDA yang tidak terbarukan seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Sedangkan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan

memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi, yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikro hidro, biodiesel yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada penganekaragaman energi, konservasi energi dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup.

3. Untuk pelestarian sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan, air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
4. Untuk meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas maka diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA tropis harus terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arah ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis SDA, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian perhatian khususnya harus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang ada di wilayahnya. Dengan demikian pembangunan ke depan tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.

5. Kebijakan pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap sebagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas SDA. Pengelolaan SDA di kawasan tertinggal diberikan perhatian khususnya agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan wilayah, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukumnya untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
6. Dalam kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan harus diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam berupa banjir dan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana banjir dan kebakaran agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam banjir dan kebakaran.
7. Untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik diperlukan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan

- hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
8. Dalam peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup perlu dukungan melalui peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
 9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang berisi, visi, misi dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jambi 20 tahun ke depan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Keberhasilan pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, perlu didukung oleh : (1) Komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang bersih, baik dan demokratis; (2) Konsistensi dalam kebijakan dan implementasinya; (3) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

